

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Abdullah, Rozali. 1991. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philip M, dkk. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Istanto, F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta : CV. Ganda, Yogyakarta.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C. S. T. 1984. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marbun, S.F. 2011. *Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Cet.3. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M.D., Mahmud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media.
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Ridwan, H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, Wicipto. 2001, *"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara" Suatu Perbandingan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrani, Riduan. 2009. *Kata – Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung :

P.T. Alumni.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Utrecht, E. 1991. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar.

Wiyono, R. 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Gravika.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 01/G/2015/PTUN.Yk.

Internet:

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8328/SKRIPSI%20GABUNG.pdf?seence=1> diakses pada Tanggal 1 Desember 2016.

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/bataldemi-hukum-602043.html>
diakses pada tanggal 27 November 2016 pukul 17.18 WIB.